



## DINASTI POLITIK PILKADA BANTEN 2024 FENOMENA DRAMATISASI DILEMA DEMOKRASI

Luis Fiska Rahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email:luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

### Abstrak

Pilkada Banten 2024 kembali menghadirkan diskursus hangat mengenai fenomena dinasti politik yang telah lama mewarnai kontestasi elektoral di daerah tersebut. Kehadiran kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan aktor politik sebelumnya menunjukkan bahwa praktik politik dinasti masih memiliki daya hidup kuat dalam struktur politik lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan jejaring kekuasaan, tetapi juga menimbulkan dramatisasi di ruang publik mengenai dilema demokrasi: antara hak politik setiap warga negara untuk dipilih dan kekhawatiran terhadap terkonsolidasinya kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu. Dramatisasi ini diperkuat oleh pemberitaan media serta perdebatan di ruang digital yang menyoroti isu integritas, objektivitas pemilih, dan potensi melemahnya mekanisme checks and balances. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini menganalisis konstruksi wacana yang berkembang, persepsi masyarakat, serta implikasi keberlanjutan dinasti politik terhadap kualitas demokrasi lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun dinasti politik tidak sepenuhnya melanggar regulasi, praktik ini berpotensi menciptakan asimetri kompetisi, mempersempit regenerasi kepemimpinan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, Pilkada Banten 2024 menjadi cerminan penting bagi evaluasi mendalam terhadap dinamika demokrasi Indonesia di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Dramatisasi, Demokrasi, Pilkada Banten 2024

### Abstract

*The 2024 regional election in Banten once again highlights the persistent issue of political dynasties that has long shaped the region's electoral landscape. The emergence of candidates with close familial ties to previous political leaders demonstrates that dynastic practices remain deeply embedded within local power structures. This phenomenon not only reflects the continuity of political networks but also intensifies public dramatization of democracy's dilemma: the tension between the constitutional right of every citizen to run for office and the growing concern over the concentration of power within specific family circles. Media coverage and online public discourse further amplify this dramatization, raising questions about integrity, voter objectivity, and the potential weakening of democratic checks and balances. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the construction of public narratives, community perceptions, and the broader implications of political dynasties for the quality of local democracy. The findings indicate that, although political dynasties do not inherently violate electoral regulations, they tend to create asymmetrical competition, hinder leadership regeneration, and erode public trust in democratic processes. Consequently, the 2024 Banten election serves as a critical reflection point for assessing the evolving dynamics of Indonesia's local democratic practices.*

**Keywords:** Dramatization, Democracy, Banten Election 2024

## PENDAHULUAN

Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menguatkan proses demokrasi di tingkat daerah. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mencuat, salah satunya adalah keberlanjutan praktik dinasti

politik. Di Banten, fenomena ini telah menjadi ciri khas dalam peta politik lokal, di mana kekuasaan sering kali diwariskan atau dijaga dalam lingkup keluarga elite politik. Praktik ini menimbulkan perdebatan panjang mengenai keabsahan dan dampaknya terhadap demokrasi itu sendiri.

Secara konseptual, demokrasi bertumpu pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi politik yang inklusif. Namun, dinasti politik dianggap mengerdilkan semangat tersebut dengan memusatkan kekuasaan pada kelompok tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dominasi keluarga dalam politik sering kali menutup peluang bagi munculnya tokoh-tokoh baru yang kompeten, menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, dan memperlemah akuntabilitas pemerintahan.

Banten, sebagai salah satu provinsi dengan sejarah panjang dalam praktik dinasti politik, menghadirkan realitas yang unik. Nama-nama besar dalam politik lokal, seperti keluarga Ratu Atut Chosiyah, telah lama menjadi pemain kunci dalam pemerintahan daerah. Kendati demikian, fenomena ini tidak sepenuhnya disertai oleh resistensi publik yang kuat, mengingat faktor budaya patronase dan loyalitas yang masih dominan di masyarakat Banten.

Selain itu, keberadaan dinasti politik di Banten juga dipengaruhi oleh sistem politik yang memungkinkan kemudahan akses bagi keluarga elite untuk mempertahankan kekuasaan. Dukungan jaringan finansial, penguasaan birokrasi, serta mobilisasi massa yang efektif menjadi faktor utama yang memperkuat posisi dinasti politik dalam setiap kontestasi Pilkada.

Latar belakang ini menunjukkan adanya dilema mendasar dalam demokrasi lokal. Di satu sisi, Pilkada memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung. Namun, di sisi lain, struktur kekuasaan yang didominasi dinasti politik justru membatasi alternatif pilihan bagi masyarakat. Dengan demikian, kajian terhadap Pilkada Banten 2024 menjadi relevan untuk memahami bagaimana dinasti politik memengaruhi proses demokrasi, serta mengeksplorasi potensi jalan keluar untuk memperkuat kualitas demokrasi di masa depan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu manifestasi nyata dari demokrasi di Indonesia. Dalam proses ini, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin yang akan membawa aspirasi mereka ke dalam kebijakan publik. Namun, dinamika politik di tingkat daerah sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena dinasti politik. Di Banten, dinasti politik telah menjadi sorotan dalam beberapa dekade terakhir, di mana penguasaan politik oleh keluarga tertentu kerap menimbulkan dilema tersendiri bagi demokrasi.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dinasti politik dapat dianggap sebagai penguatan partisipasi politik atau justru menjadi ancaman terhadap prinsip demokrasi? Di satu sisi, dinasti politik sering kali didukung oleh sumber daya yang kuat dan jaringan politik yang luas, yang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, dominasi keluarga dalam politik dapat membatasi persaingan yang sehat dan menciptakan ketergantungan struktural yang menghambat inovasi dalam kepemimpinan.

Pilkada Banten 2024 kembali menjadi panggung besar yang mencerminkan dilema demokrasi tersebut. Para kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik sebelumnya, termasuk dengan tokoh-tokoh yang telah lama memegang kendali pemerintahan, menjadi isu sentral yang memancing perhatian publik. Di tengah deras arus demokrasi, kehadiran dinasti politik sering kali dipersepsikan sebagai paradoks, yaitu mempertahankan legitimasi formal melalui mekanisme demokrasi, namun dengan potensi

membatasi ruang kompetisi.

Pendahuluan ini bertujuan untuk mengulas fenomena dinasti politik di Pilkada Banten 2024 sebagai salah satu contoh dramatisasi dilema demokrasi di Indonesia. Dengan menyoroti konteks historis, dinamika sosial, dan tantangan yang dihadapi, tulisan ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dinasti politik memengaruhi proses demokrasi dan apa implikasinya bagi pembangunan daerah di Banten.

Dinasti politik merupakan fenomena yang menimbulkan dilema serius dalam konteks demokrasi. Sebagai sebuah sistem yang idealnya mengedepankan persaingan bebas dan kesempatan yang setara bagi setiap individu, keberadaan dinasti politik justru kerap menjadi penghalang bagi terciptanya kompetisi politik yang sehat. Di satu sisi, dinasti politik sering kali dianggap sebagai produk demokrasi, karena mereka muncul melalui mekanisme pemilu yang sah. Namun, di sisi lain, pengaruh besar keluarga tertentu dalam proses politik sering kali membatasi prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan, inklusivitas, dan partisipasi yang sejati.

Fenomena ini menjadi nyata di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Banten, yang sering disebut sebagai "laboratorium" dinasti politik. Keluarga elite tertentu menguasai posisi-posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif, dengan dukungan struktur kekuasaan yang terbangun kuat. Hal ini menciptakan paradoks: sementara demokrasi memungkinkan keterlibatan rakyat secara langsung, dominasi dinasti politik cenderung membuat pilihan-pilihan rakyat menjadi terbatas. Perspektif Demokrasi Substantif Demokrasi tidak hanya soal prosedural—seperti pelaksanaan pemilu—tetapi juga tentang substansi, yaitu keberlanjutan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam politik. Dominasi dinasti politik sering kali menciptakan ketimpangan peluang bagi individu lain yang ingin bersaing, karena mereka harus menghadapi kekuatan finansial, jaringan politik, dan pengaruh sosial yang sulit ditandingi. Perspektif Kesejahteraan Publik Dinasti politik dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung bias terhadap kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, sehingga mengorbankan kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, akuntabilitas pemimpin dari dinasti politik sering kali dipertanyakan, karena mereka lebih fokus mempertahankan kekuasaan daripada melayani rakyat. Perspektif Budaya Politik Lokal Di daerah seperti Banten, budaya patronase yang kuat sering kali menjadi alasan utama dinasti politik bertahan. Loyalitas berbasis hubungan personal atau kekerabatan antara elite dan masyarakat membuat peluang munculnya aktor politik baru semakin kecil. Hal ini menciptakan siklus dominasi yang sulit dipatahkan.

Namun demikian, dinasti politik tidak selamanya membawa dampak negatif. Dalam beberapa kasus, pemimpin dari dinasti politik mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan memanfaatkan pengalaman dan jaringan mereka untuk pembangunan daerah. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa dominasi dinasti politik tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Pilkada Banten 2024 menjadi refleksi nyata dari dilema ini. Apakah demokrasi di Banten mampu berkembang menuju inklusivitas dan kompetisi yang sehat, atau justru terjebak dalam pola yang sama? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah masa depan demokrasi lokal di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena dinasti politik dalam konteks Pilkada Banten 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dilema demokrasi

yang muncul akibat dominasi dinasti politik, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap proses demokrasi lokal. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana data yang diperoleh akan dianalisis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang dikaji. Fokus penelitian terletak pada eksplorasi hubungan antara dinasti politik dengan tantangan demokrasi di Pilkada Banten 2024. Penelitian dilakukan dengan fokus pada wilayah Provinsi Banten, mengingat daerah ini memiliki sejarah panjang dalam praktik dinasti politik. Tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam Pilkada Banten 2024. Pengamat politik dan akademisi yang memiliki pandangan mengenai dinasti politik. Masyarakat umum sebagai pemilih, khususnya yang terpengaruh langsung oleh dinasti politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik di Banten tetap menjadi fenomena dominan dalam Pilkada 2024. Keluarga besar tokoh politik tertentu, seperti yang pernah memimpin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kembali mencalonkan diri atau mengajukan kerabat dekat sebagai kandidat. Hal ini didukung oleh penguasaan jaringan politik yang mapan, sumber daya finansial yang besar, serta dukungan sosial yang terus dipelihara melalui patronase. Keterlibatan dinasti politik ini menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat. Sebagian mendukung karena merasa ada kesinambungan dalam pembangunan, sementara sebagian lain mengkritik karena dianggap mempersempit ruang bagi kandidat alternatif. Masyarakat yang kritis terhadap dinasti politik umumnya berasal dari kelompok muda dan kalangan intelektual yang menginginkan pembaruan dalam kepemimpinan daerah.

Fenomena dinasti politik memberikan dua dampak utama terhadap demokrasi lokal di Banten. Positif Keberlanjutan Kebijakan Beberapa responden menilai bahwa dinasti politik memberikan stabilitas dalam pemerintahan karena adanya kesinambungan kebijakan. Pemimpin yang berasal dari dinasti politik cenderung memahami konteks pembangunan daerah dan memiliki akses terhadap jaringan yang luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Negatif Terbatasnya Persaingan Politik Di sisi lain, dinasti politik cenderung memonopoli ruang politik, sehingga mengurangi kesempatan bagi aktor-aktor baru yang berpotensi membawa perubahan. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan keterbukaan dan keadilan. Dalam Pilkada 2024, banyak kandidat non-dinasti yang kesulitan bersaing karena keterbatasan dana kampanye dan kurangnya akses terhadap media serta sumber daya politik lainnya.

Dinamika Budaya Politik Lokal Budaya patronase yang kuat di Banten menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelanggengan dinasti politik. Masyarakat cenderung memberikan loyalitas kepada figur-figur tertentu berdasarkan hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, atau jasa yang pernah diberikan oleh keluarga politik tersebut. Fenomena ini diperkuat oleh sistem politik yang memungkinkan dominasi elite dalam pengelolaan sumber daya publik. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan kecil dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, yang mulai mempertanyakan keberlanjutan dinasti politik. Mereka menginginkan pemimpin yang lebih transparan, inovatif, dan terlepas dari pengaruh nepotisme. Pilkada Banten 2024 sebagai Refleksi Dilema Demokrasi Pilkada Banten 2024 menggambarkan dilema mendasar dalam demokrasi di Indonesia antara menerima keberadaan dinasti politik sebagai bagian dari sistem yang sah atau menuntut perbaikan untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil.

Dilema ini terlihat jelas pada dinamika kampanye, di mana kandidat dari dinasti politik cenderung menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk memperkuat citra diri, sementara kandidat independen harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan

perhatian publik. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi prosedural berjalan, substansi demokrasi masih menghadapi tantangan besar di tingkat lokal.

Beberapa strategi yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian meliputi Peningkatan Literasi Politik Masyarakat Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan karena hubungan kekeluargaan. Penguatan Regulasi Pemilu Membatasi dominasi keluarga tertentu melalui aturan yang lebih tegas, seperti transparansi dana kampanye dan pelaporan aset calon. Mendorong Keterlibatan Aktor Baru: Memberikan insentif bagi kandidat non-dinasti untuk mencalonkan diri, seperti akses dana kampanye yang lebih adil atau subsidi politik. Pembahasan ini mengungkap bahwa fenomena dinasti politik tidak hanya berkaitan dengan persoalan individu atau keluarga tertentu, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam demokrasi Indonesia. Pilkada Banten 2024 menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami dinamika ini, sekaligus membuka ruang diskusi untuk mencari solusi yang lebih baik bagi demokrasi lokal di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dinasti politik masih menjadi fenomena yang kuat dalam Pilkada Banten 2024, menciptakan dilema serius dalam demokrasi lokal. Dinasti politik hadir sebagai paradoks demokrasi: di satu sisi, mereka menggunakan mekanisme pemilu untuk mempertahankan kekuasaan secara sah; namun di sisi lain, dominasi mereka membatasi esensi demokrasi yang mengedepankan kompetisi politik yang sehat dan inklusif. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut Dominasi Dinasti Politik Pilkada Banten 2024 menunjukkan bahwa keluarga elite politik tertentu tetap mampu menguasai arena politik dengan memanfaatkan sumber daya finansial, jaringan sosial, dan budaya patronase yang kuat. Hal ini memperkuat pola politik oligarkis yang membatasi peluang bagi tokoh baru yang kompeten untuk bersaing. Dampak terhadap Demokrasi Dinasti politik memberikan dampak ganda terhadap demokrasi. Di satu sisi, mereka menawarkan kesinambungan dalam pembangunan dan stabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, mereka menciptakan ketimpangan kompetisi politik, mengurangi akuntabilitas pemimpin, dan memperkuat siklus kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan keluarga. Dinamika Kesadaran Masyarakat Budaya politik lokal yang masih mengedepankan patronase menjadi salah satu faktor yang mendukung kelanggengan dinasti politik. Namun, terdapat indikasi perubahan dalam pola pikir generasi muda yang mulai mempertanyakan keberlanjutan praktik ini dan menginginkan pemimpin yang lebih inovatif serta transparan.

Perlu Strategi Perbaikan Demokrasi Untuk menghadapi tantangan dinasti politik, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan literasi politik masyarakat, penguatan regulasi pemilu untuk menciptakan peluang yang lebih adil, serta pemberian insentif bagi calon pemimpin non-dinasti untuk terlibat dalam kontestasi politik. Secara keseluruhan, Pilkada Banten 2024 mencerminkan tantangan mendasar demokrasi di Indonesia, di mana praktik dinasti politik menunjukkan perlunya reformasi sistemik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan kompetitif. Penelitian ini merekomendasikan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mengatasi dilema ini, demi memperkuat kualitas demokrasi lokal di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101-464 (1). 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Dairul, O. :, Akbar, B., Djaenuri, A., & Lukman, S. (2021). Model Baru Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Era Pandemi Covid-19 Di Provinsi Banten. *Jurnal Education and*

- Development, 9(3), 446–451.
- Dasyah, F. (2021). *Journal of Law Science*. *Journal of Law Science*, 3(2), 53–62. [www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical](http://www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical)
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.1234>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- fitri adelia, & mahasiswa magister politik dan pemerintahan fakultas dan ilmu sosial dan ilmu politik universitas gajah mada. (2019). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* | 91 Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04(dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal), 1–22. <https://doi.org/10.31629/kemudi>.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Hady, N. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. *Arena Hukum*, 11(3), 484–499. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.4>
- Hafsari, I., Andriyani, L., & Setiawan, A. (2022). Rekrutmen Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten. *Integralistik*, 33(2), 90–99. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i2.37725>
- Hayati, E., Ali, H., & Ridayani, R. (2017). *Hukum Tata Negara*. *Hukum Tata Negara*, 3(May), 18–27. <https://doi.org/10.52574/syiahkualauniversitypress.333>
- Hendrawati, S. (2024). Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 140–147. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/108%0Ahttps://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/108/99>
- Heru Wahyudi, & Zakaria Habib Al-Ra'zie. (2022). Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Petahana; Kasus Pilkada Di Lebong Dan Banten. *Jurnal Adhikari*, 2(1), 292–301. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i1.62>
- Hidayati, N. (2014). Dinasti politik dan demokrasi Indonesia. *Orbith*, 10(1), 18–21.
- Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>
- Mahpudin, Hamid, A., & Dewi, S. K. (2018). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018*, 108–130. [http://repository.fisip-untirta.ac.id/956/1/naskah\\_9.pdf](http://repository.fisip-untirta.ac.id/956/1/naskah_9.pdf)
- Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 97–110. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>
- Putra, A. M. (2011). Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011. *Jurnal ULTIMA Comm*, 3(2), 23–34. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v3i2.203>
- Putra, P., & Rakhmadi, R. (2020). Political Dynasties in the Regional Head Election and Regional Autonomy: A Study of the Dynamics of the 2020 Regional Head Election. *Jurnal Terekam Jejak*, 1(1), 1–23.
- Putri, N. S., Hidayat, H., & Romli, R. C. (2021). Isu Dinasti Politik pada Pilkada Serentak 2020 di Media Daring: Analisis Isi Pemberitaan Kompas.com. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3(2), 98–112. <https://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22988>
- Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, & Zulfa Harirah MS. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>
- Riyanto, A., Fridiyanti, Y. N., & Prihatmoko, J. J. (2024). Praktek Dinasti Politik Pada Pilkada Serentak Jawa Tengah Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 35–46.
- Sukri, M. A. (2020). *Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya*

- Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190.
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Tristana, R. W. (2013). *JEPARA ( Analisis Implikasi Sosial dan Politik )*.